**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PENDUDUK RENTAN
ADMINISTRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAMPAR**

RIRI GUSTINA

Email : ririgustina897@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the policy and the factors which influence The implementation of the population policy of the vulnerable population department of population and civil registration district Kampar.

This research uses qualitative approach. The result of this research shows that The implementation of the population policy of the vulnerable population department of population and civil registration district Kampar based on the interviews with employees of the administration vulnerable population, people who have vulnerable administration, people who have not vulnerable administration, district, RT, RW that the implementation of the population policy of the vulnerable population at department of population and civil registration district Kampar is not optimal

It is seen from the data collection team which is not provided by the departement of population and civil registration for vulnerable population administration, lack of SOP, lack of the employees and also lack of the facilities to support the work which make it is very hard to coordinate the population who come and move from the district.

Keywords : The policy implementation and administration of the vulnerable population

PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia pasti ingin di akui keberadaannya dengan adanya identitas kependudukan dan setiap kehidupan manusia pasti akan mengalami yang namanya siklus kehidupan berbagai peristiwa penting dalam kehidupannya. Peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bahkan tidak bisa di pungkiri bahwa setiap manusia mengalami bencana alam dan bencana sosial. Peristiwa-peristiwa penting tersebut harus mendapat pencatatan karena bersangkutan dengan identitas manusia dan peristiwa tersebut begitu penting, oleh sebab itu maka demi terciptanya keadaan yang aman, tertib dan damai maka di perlukan suatu kepastian hukum yang sah supaya bisa diakui sebagai warga negara yang sah.

Maka dengan itu adanya peraturan yang mengatur dalam bidang kependudukan yang di sebut dengan administrasi kependudukan.

Masih banyak penduduk Kabupaten Kampar yang belum mempunyai dokumen kependudukan yang di sebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial yang terjadi. Administrasi kependudukan yang di laksanakan di lembaga pencatatan sipil yang di sebut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun adakalanya suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki identitas bukti tertulis yang memiliki kepastian hukum. Hal ini bukan suatu kemauan dari masyarakat tersebut namun diakibatkan dari adanya bencana yang dialami baik itu bencana alam maupun bencana sosial yang mengakibatkan seseorang kehilangan identitas tertulis yang dimilikinya atau yang sering disebut dengan penduduk rentan administrasi kependudukan

Dengan demikian untuk memiliki status tersebut, maka masyarakat harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu dengan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian masyarakat akan memperoleh bukti tertulis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan rentan disini adalah masyarakat yang memiliki hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti orang terlantar, keluarga miskin, lanjut usia, dan korban bencana

kemiskinan yang telah menghambat mereka untuk mengurus dokumen kependudukan seperti biaya transportasi karena jarak tempuh tempat tinggal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang lumayan jauh.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan menuju peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini disebut pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan dapat diketahui dengan cara sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Data yang diperoleh dari ketiga cara tersebut sebenarnya tidak hanya mengetahui laju pertumbuhan penduduk saja, tetapi juga diperoleh data lain yang berhubungan dengan kependudukan. Misalnya, tingkat pendapatan penduduk, jumlah angka pengangguran, jumlah

penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan. Administrasi Kependudukan itu memuat peristiwa penting yang telah di jelas kan di atas sebelumnya peristiwa penting tersebut harus di laporkan supaya bisa di data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Pendataan adalah upaya mengumpulkan penduduk pengungsi, korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

Penduduk Rentan Administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang di sebabkan oleh korban bencana alam dan korban bencana sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bukti tertulis (formulir) untuk penduduk yang mengalami rentan administrasi kependudukan telah ditegaskan dalam undang-undang 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2010 tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan serta Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.04 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap Pencatatan Sipil merupakan salah satu bagian dari sistem menyeluruh dalam sebuah Negara. Sistem Pencatatan Sipil didalam sebuah Negara memiliki tujuan utama untuk menghasilkan dokumen. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut bagi kehidupan seseorang demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka perlu diterbitkannya suatu dokumen kependudukan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan yang berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akan dilaksanakan oleh instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pelayanan urusan administrasi kependudukan.

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam
- b. Penduduk korban bencana sosial
- c. Orang terlantar
- d. Komunitas terpencil

Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial pendataan penduduk rentan

administrasi kependudukan di lakukan Tim Pendataan yang di bentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan penerbitan dokumen bagi penduduk rentan

administrasi kependudukan. Pendataan terhadap pengungsi, korban bencana alam, dan korban bencana sosial dilakukan oleh Tim pendataan

Tim Pendataan yang dimaksud adalah tim pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dalam rangka penerbitan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Pada hakikatnya pelaksanaan bagi penduduk yang rentan administrasi kependudukan sama dengan pelaksanaan penduduk seperti biasanya yang membedakannya adalah adanya Tim pendataan bagi penduduk yang rentan administrasi kependudukan yang didatangkan langsung tapi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Tim pendataannya tidak turun kelapangan langsung. Bagi korban bencana alam dan bencana sosial diberikan formulir SKPTI dan SKPS

Surat Keterangan Pengganti Tanda identitas (SKPTI) adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial didaerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana, dan korban bencana sosial didaerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan

sebagai salah satu syarat penerbitan kutipan kedua akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2010, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengajukan permintaan kepada pemerintah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, berupa :

- a. Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01)
- b. Formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02)
- c. Blangko Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (BR-1.01)
- d. Formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (F-2.01)

Oleh karena itu, persoalan-persoalan mengenai masalah administrasi kependudukan seperti masalah rentan administrasi kependudukan banyaknya yang tidak mempunyai dokumen

kependudukan merupakan masalah negatif yang harus segera ditangani dengan baik. Pendataan penduduk bagi rentan administrasi kependudukan sangatlah penting bagi penduduk karena apabila dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar hanya menunggu penduduk yang melaporkan sendiri sangatlah sulit oleh karena itu pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus turun kelapangan langsung.

Sistem dan Mekanisme dan prosedur dalam Pelaksanaan Pendataan Rentan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan titik lokasi pendataan
- b. Menyiapkan printout data keluarga dan data agregat penduduk rentan
- c. Melakukan pendataan
- d. Melakukan perekaman sidik jari dan pemotretan KTP e-
- e. Melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir Pendataan (FR.1.01) dan atau formulir bio data penduduk WNI (F1.01)

f. Mengkoordinasikan penerbitan SKPTI dan SKPS

g. Mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan

h. Bagi korban bencana alam atau sosial diberikan SKPTI dan SKPS

maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar?
2. Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar?

Konsep Teori

Dalam rangka teori ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas. **James Anderson** dalam **Wahab (2012:8)** memaknai kebijakan sebagai *"a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Chaizi Nasucha dalam **pasolong (2011:39)** mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Putra (2005:35) mengatakan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diberlakukan.

Kalau kita mendalami lebih jauh mengenai implementasi kebijakan, orientasinya tunggalnya adalah pada kepentingan publik. Maka tiap-tiap kebijakan publik memiliki semangat kepublikan, yang mau tidak mau implikasinya harus menempatkan publik sebagai aktor utama dalam tiap proses

Jadi, implementasi kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai tahapan praktis dan aktivitas dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Menurut **Atmosudirjo (2001:24)** administrasi adalah suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern dan eksistensi dari pada organisasi ini berkaitan dengan organisasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memahami makna dibalik data yang tampak dan melakukan eksplorasi untuk memperjelas fenomena permasalahan yang terjadi

1. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari objek penelitian.

b. Data sekunder

Data informasi serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi/kantor terkait dengan tujuan perolehan data yaitu mengenai

- Gambaran umum Kabupaten Kampar
- Jumlah penduduk
- Struktur Organisasi

Menurut **Sugiyono (2012:62-63)**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*)

a. Observasi

Menurut **Soekarto (2002:69)**

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi disini lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan – pertanyaan

b. Wawancara

Estenberg dalam **Sugiyono (2012:72)** mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

menurut **Farouk Muhammad dan Djaali (2005:29)** Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dengan menggunakan teori George Edward III dalam Subarsono

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para aktor yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasinya pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Bagi suatu organisasi atau lembaga, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Dalam Pelaksanaan suatu kebijakan sumberdaya merupakan unsur yang penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan keahliannya, informasi yang relevan dan cukup untuk melaksakan suatu kebijakan yang berupa prosedur, tata kelola maupun yang lainnya dan berupa informasi yang dihasilkan, kemudian kewenangan dan otorisasi dari pejabat yang bersangkutan yang menjamin bahwa suatu kebijakan itu akan dapat berjalan dengan baik dan dapat diarahkan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan baik berupa sarana maupun prasarana yang berbentuk fisik dan non fisik.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kompetensi) berakibat tidak dapat terlaksanannya kebijakan secara sempurna karena mereka tidak dapat melaksanakan dan melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah berusaha meningkatkan skill(keahlian)/kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan dan sekaligus kegiatan yang akan dilakukannya. Untuk itu perlu adanya

manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja.

c. Disposisi

Salah satu yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, yakni kesadaran pelaksana, petunjuk.arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran proram namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat dan cepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari pelaksanaan. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran atas apa yang kita akan lakukan. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Wujud dari dukungan pimpinan ini atau sikap dari suatu pimpinan adalah prioritas yang utama, penempatan pelaksana/personil dengan orang-orang yang mendukung pelaksanaan, dan memperhatikan keseimbangan beberapa hal antara lain daerah, agama, suku, gender dan karakteristik demografi yang lainnya. Di samping itu penyediaan dana yang cukup memberikan insentif bagi para pelaksana agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan terutama bagi pelaksana /personil yang memiliki kemampuan dan bekerja sesuai dengan keahliannya serta memberikan kontribusi yang maksimal dalam proses pelaksanaan kebijakan. Integritas pegawai merupakan hal yang fundamental dan mendasar dan wajib

dimiliki dan dijaga secara terus menerus oleh setiap pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Dengan integritas yang tinggi dan baik akan menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan praktek-praktek birokrasi yang sehat. Integritas harus dicontohkan dan diterapkan secara konsisten oleh pimpinan, kemudian diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, pegawai rentan administrasi kependudukan dan seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Tindakan tegas dan konkrit perlu diberikan kepada setiap pegawai dan pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang melakukan tindakan –tindakan yang bertolak belakang dengan integritas serta memberikan pembinaan secara berkala kepada setiap pegawai yang diduga sikap integritasnya perlu diperbaiki dan ditingkatkan lebih baik lagi.

d. Struktur Birokrasi

pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hunungan yang potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Winarno (150: 2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber

daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang luas dan kompleks

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan rentan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dilihat dari 4 aspek indikator yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan rentan administrasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pendaftaran dan Pendataan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum optimal, karena implementor maupun pelaksana kebijakan belum mampu berkoordinasi dengan baik mengenai tujuan dan sasaran dalam mengimplementasi kebijakan rentan administrasi kependudukan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan
2. Sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar bahwa belum optimal, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar masih kekurangan sumberdaya yakni pegawai dan juga fasilitas pendukung lainnya yang belum memadai
3. Disposisi, yakni dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dilihat dari karakteristik dalam pelayanan sudah di katakan

belum optimal, karena pelayanan kurang disenangi oleh masyarakat yang mana yang memberikan pelayanan kurang ramah kepada masyarakat.

4. Struktur Brokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sudah optimal, karena dalam memberikan pelayanan dan Mekanisme/prosedur pelayanan yang jelas, sistematis, namun dianggap berbelit-belit karena prosedurnya yang harus diikuti dan dilewati berupa loket-loket.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat direkomendasi secara umum Saran Untuk Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar bahwa :

Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri dalam Negeri 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan pendataan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan namun tetap mempertahankan citra baiknya dalam pelayanan lewat komunikasi yang telah dibangun oleh implementor, pelaksana pelayanan bahkan terhadap penerima pelayanan yakni masyarakat, agar pelayanan lebih ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo.2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*.Bandung: CV. Alfabeta

Islamy,Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Askara

Lucas, David. 1986. *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Moleong.Lexy. J.2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya

Muhammad Foruok, Djaali.2005. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Revisi* Jakarta: Tim Restu Agung

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan praktek*. Surabaya: Penerbit PNM

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Publik Tidak Untuk Publik*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara

Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya diIndonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soekarto, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya

Sujianto.2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alafiau

Sugandi. Yogi Suprayogi.2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan lmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tajchan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik* Bandung: Lemlit UNPAD

Tjiptoherijanto Priyono. 1998. *Keseimbangan Penduduk, Manajemen*

Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Wahab, Solihin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Model-model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012 *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Skripsi

Yuliana. 2007. Implementasi Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Penduduk Kota Pekanbaru

Dokumentasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri. No.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 04 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan